

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Borg, W.R dan Gall, M.D. 1989, *Educational Research: An Introduction*. White Plains: Longman Inc.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Daniel Kaufmann, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi, 2010, *Worldwide Governance Indicators, The World Bank Development Research Group Macroeconomic and Growth Team*.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai)*. Jakarta: Buku Kompas, Jakarta.
- Gajah Mada Universitas, 2020, *Ringkasan Eksekutif Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020)*, Edisi 2/6 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, 1975, Stuttgart: K.F. Koehler Verlag.
- Harsono, Boedi, 2019, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2002,
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja, Jakarta.

L.J Van Apeldoorn dalam Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung.

Lapananda, Yusran, 2017, “Hukum Pengelolaan Barang milik Daerah”,
RMBOOKS, Jakarta.

Lexy J. Moleong, 1994, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya,
Bandung.

Lon Fuller, 1964, *The Morality of Law*, New Haven and London, Yale University
Press, London.

OSS, UU Cipta Kerja : Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja, 2 Juni 2021

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media,
Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta:
Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:
Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2011, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Universitas
Atmajaya, Yogyakarta.

Sumini, R, 2020, Modul Pengelolaan Barang Milik Negara. *Modul Pengelolaan Barang Milik Negara*.

JURNAL ILMIAH

Alviola, B. K., & Silviana, A. (2023). Jangka Waktu HGB Di Atas HPL Pasca PP No 18 Tahun 2021. *Notarius*, 16(2), 764–775, Agustus 2023

Arrum, D. A, 2019, Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631-1654

Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 71-84.

Dwi Kusumo Wardhani, Disharmoni RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=khmvCeAAAAAJ&citation_for_view=khmvCeAAAAAJ:UeHWp8X0CEI

[C](#)

Dr. Duhita Driyah Suprapti Faridhotun Ridho Yudha Kusuma, Omnibus Law On Job Creation As Means To Increase Investment Based on Welfare State International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 23, Issue 1 (December) 2020 <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2020/12/IJBEL23-041.pdf>

Dra. Elly Fatimah, M.Si dalam *Virtual Public Lecture (VPL)* Seri 11: *Regulatory Impact Analysis* dan Pengalaman Praktiknya dalam Pemerintahan, pada tanggal 26/8/2021 <https://lan.go.id/?p=6706>

Mekonnen Bogale, Endalkachew Desta, *The Role of Governance in the Ease of Doing Business: International Perspectives*, Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology, Vol. 45No.2, 2024

Muhammad Farid Alwajdi, “Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia”, *Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2, Agustus 2020.

Muhammad Insa Ansari, “Omnibus Law untuk Menata Regulasi Penanaman Modal (Omnibus Law for Arranging Investment Regulations),” *Rechtsvinding*, Vol. 9, No.1, April 2020.

OSS.go.id, Bahlil, Sistem OSS Berbasis Risiko Terus Dikembangkan <https://oss.go.id/informasi/artikel/bahlil-:-sistem-oss-berbasis-risiko-terus-dikembangkan>

Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Samarinda. *EJournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018-5032.

Riyanto, Benny, *Rapat Cost and Benefit Analysis Bidang Sosial budaya*, 13/8/2020, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2020081308482837/pentingnya-pendekatan-cost-and-benefit-analysis-dalam-evaluasi-regulasi>
[diakses 7/12/2024]

Safik, Ahmad dan Ewinda, Mira, Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al

Azhar Indonesia Vol. 01, Nomor 08, Juli 2023

Septian Lucky Dwi Putra Gode, Aldo Trias Kurniawan, Okka Soegiharta Rijanto,

Victor Van's Hau Shen Oey, Analisa Yuridis Hak guna Bangunan Di Atas

Hak Pengelolaan Yang Bisa Dijadikan Jaminan Utang, Unnes Law Review

Vol. 5, Issue 4, Juni 2023,

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url>

[=https://www.review-](https://www.review-)

[unes.com/index.php/law/article/download/548/438&ved=2ahUKEwim35K](https://www.unnes.com/index.php/law/article/download/548/438&ved=2ahUKEwim35K)

[DudSMAxXERWwGHYycE1IQFnoECDUQAQ&usg=AOvVaw0-](https://www.unnes.com/index.php/law/article/download/548/438&ved=2ahUKEwim35K)

[eF5F4GiyAbeZhdCKoen](https://www.unnes.com/index.php/law/article/download/548/438&ved=2ahUKEwim35K)

Silviana, A., (2017) Pemanfaatan Tanah di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi dan Implementasi, Diponegoro Private Law Review,

Suganda, Yosua Simon. (2022). STATUS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH HASIL REKLAMASI OLEH SUBJEK HUKUM ASING. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.30737/dhm.v5i1.4706> [diakses 29/11/2024]

Triadi Kurniawan. 2020. Pemberian Hak Guna Bangunan Di atas Bagian Tanah Hak Pengelolaan. Vol. 18, No. 1, Februari.

Ubaiyana, Akhmad Haris Supriyanto, Politik Hukum Kemudahan Berusaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja NEGARA HUKUM: Vol. 13, No. 1, Juni 2022, hal. 63-81

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Booklet

Undang-Undang Cipta Kerja”.Pasal 2 ayat 1 huruf c UU No. 6 Tahun 2023

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah 2020-2024

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sebagaimana
dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja..

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun
2022)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 4

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Kepala Otorita IKN No. 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan
Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi
Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara
Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-Bagian Tanah
Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan
Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

WEBSITE

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Rencana Strategi 2020-2024

https://ppid.bkpm.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Renstra_BKPM_2020-2024_final.pdf

Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia Emas 2045 Rencana Pembangunan Jangka

Panjang 2025-2045 <https://indonesia2045.go.id>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Doing Business Di

Indonesia, Kemudahan Berusaha di Indonesia, <http://www.eodb.ekon.go.id>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Booklet

Undang-undang Cipta Kerja, 2020, <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>

Penjelasan UU CK Pasal 2 ayat (1) huruf c

<https://www.antaranews.com/berita/4436189/mengenal-uu-cipta-kerja-beserta-poin-poin-utamanya>